



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 21 Februari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU
UNIT KERJA : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **MOH. INSYAFI**
2. Jabatan : **KEPALA DINAS**
3. NHK : **463709**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp.

985.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 864 m²/171 m² di KAB / KOTA PULANG PISAU, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 150 m²/42 m² di KAB / KOTA KOTA PALANGKA RAYA , HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
3. Tanah Seluas 7600 m² di KAB / KOTA PULANG PISAU, HASIL SENDIRI Rp. 40.000.000
4. Tanah Seluas 7600 m² di KAB / KOTA PULANG PISAU, HASIL SENDIRI Rp. 40.000.000
5. Tanah Seluas 7600 m² di KAB / KOTA PULANG PISAU, HASIL SENDIRI Rp. 40.000.000
6. Tanah Seluas 5057 m² di KAB / KOTA PULANG PISAU, HASIL SENDIRI Rp. 30.000.000
7. Tanah Seluas 100000 m² di KAB / KOTA PULANG PISAU, HASIL SENDIRI Rp. 35.000.000
8. Tanah Seluas 1.197 m² di KAB / KOTA KOTA PALANGKA RAYA , HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp.

216.500.000

1. MOTOR, HONDA NC11B1CA/T / SCOOTER Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 2.500.000
2. MOTOR, HONDA NC11A3C A/T / Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000



3. MOTOR, HONDA SCOPY/F1C02N28L0 Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000

4. MOBIL, HONDA HONDA MOBILIO DD4 1.5 E Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 86.800.000

D. SURAT BERHARGA Rp. 50.000.000

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 33.072.840

F. HARTA LAINNYA Rp. ---

Sub Total Rp. 1.371.372.840

III. HUTANG Rp. 393.770.779

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 977.602.061

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.